

Saatnya Publik Mengawal, Bukan Membisu

Oleh : Ngatirin

OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Topan Ginting, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Provinsi Sumut benar-benar menggetarkan Sumatera Utara.

Bukan karena nilai OTT nya yang fantastis atau oknum yang terjaring OTT itu sekelas menteri atau kepala daerah, tetapi karena orang yang tertangkap tangan itu diduga anak emas dari orang penting di provinsi ini. Ya, nama yang disebut-sebut dalam pusran kasus ini begitu dekat dengan lingkaran kekuasaan tertinggi di provinsi ini.

Namun, di balik gegap gempita penangkapan tersebut, publik mulai menunjukkan gejala yang justru berbahaya yakni sikap skeptis, apriori, bahkan apatis. Ada yang menganggap tindakan OTT ini adalah cara KPK menyelamatkan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Sikap masyarakat itu bukan tanpa alasan. Rekam jejak penanganan kasus korupsi di Indonesia memang membuat masyarakat belajar untuk tidak terlalu berharap. Sudah terlalu sering penindakan berhenti di aktor lapangan atau pejabat menengah, sementara mereka yang

berada di pucuk kekuasaan tetap melenggang, dilindungi oleh birokrasi, jejaring politik, atau kekuasaan uang. Namun justru karena itulah, publik tak boleh tinggal diam.

Ketika masyarakat berhenti peduli, ketika media hanya menjadi peneras suara kekuasaan, dan ketika wartawan lebih sibuk menuliskan puja-puji untuk pejabat yang sedang tersudut ketimbang menggali kebenaran, maka apunitas menemukan jalannya yang mulus. Apatisisme publik adalah bahan bakar bagi keberhasilan para pelindung koruptor.

Dalam konteks OTT Topan Ginting, suara-



KPK Mengendus Jejak Digital Bobby-Topan Temukan Komunikasi Mencurigakan

Jakarta, MIMBAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali bukti-bukti terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatera Utara yang menyeret sejumlah pejabat hingga pelaku usaha.

Dalam penyidikan terbaru, KPK mengamankan barang bukti elektronik seperti ponsel dari beberapa pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini.

Fokus penyidik kini mengarah pada jejak komunikasi digital, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

■ Bersambung ke Hal 11

Pakar Pidana: Tidak Mungkin Gubernur Tidak Mengetahui

PAKAR Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasih tidak percaya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution tidak mengetahui Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Ginting mendapatkan jatah Rp8miliar dari pemenang tender proyek jalan.

Demikian Genti Garnasih dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (2/7/2025).

"Tidak mungkin kan Rp8 miliar itu tanpa diketahui oleh Gubernurnya, jadi begini ya, masa Kepala

■ Bersambung ke Hal 11



Hasto Kristiyanto Dituntut 7 Tahun Penjara

Jakarta, MIMBAR - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dituntut dengan pidana 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp600 juta subsidair 6 bulan kurungan penjara.

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menilai Hasto telah terbukti melakukan tindak pidana suap dan perintangan penyidikan perkara Harun Masiku.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara sela-

■ Bersambung ke Hal 11



KMP Tunu Pratama Jaya Pulang Tenggelam di Selat Bali

6 Penumpang Tewas

KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam tak lama setelah berangkat dari Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk Bali. Kapal diperkirakan tenggelam Rabu malam pukul 23.35 WIB. Posisi terakhir kapal terlihat di perairan Selat Bali.

Per Kamis (3/7) petang, dari total 65 penumpang penumpang dan awak kapal KMP Tunu Pratama Jaya, sebanyak 36 orang sudah ditemukan, 6 orang di antaranya meninggal dunia, 30 lainnya selamat, sementara sekitar 29 - 30 orang lainnya masih dalam pencarian.

Korban yang selamat dalam peristiwa tenggelamnya kapal atau KMP Tunu Pratama Wijaya di Selat Bali, saat ini

■ Bersambung ke Hal 11



Jadwal

Salat

8 MUHARRAM 1447 H

Imsak : 04:48 WIB	Ashar : 15:58 WIB
Subuh : 04:58 WIB	Maghrib : 18:41 WIB
Zuhur : 12:32 WIB	Isya : 19:57 WIB

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah Jejak Digital Bukti Baru Kekuasaan

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Dalam era teknologi informasi saat ini, jejak digital menjadi bukti yang tak bisa diremehkan. Tidak seperti pengakuan lisan yang bisa berubah-ubah, data digital dari ponsel, email, aplikasi pesan, hingga transaksi daring bersifat objektif dan kronologis. Bagi KPK, memeriksa jejak digital Bobby Nasution adalah langkah metodologis yang rasional, mengingat relasi kerja antara Gubernur dan Kadis PUPR pasti melibatkan komunikasi intensif, termasuk soal proyek infrastruktur strategis.



■ Bersambung ke Hal 11

Menyoroti Timpangnya Pelayanan Publik di PN Medan Pembangunan Fisik Gedung Masif, Sementara SIPP Rusak



KETIMPANGAN terhadap pelayanan publik di Pengadilan Negeri (PN) Medan sangat dirasakan bagi para pencari keadilan. Indikatornya terlihat dari masifnya pembangunan fisik rehabilitasi gedung, sementara Website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medam tidak dapat diakses oleh para pencari keadilan.

Miris! Saat diketahui bahwa belum lama di area gedung PN Medan dilakukan renovasi di bagian kantin, namun saat ini kantin yang cukup baik tersebut kembali dibongkar untuk dilakukan rehabilitasi, diikuti bagian gedung lainnya.

■ Bersambung ke Hal 11

RI Kutuk Israel Usai Bunuh Direktur RS Indonesia

Jakarta, MIMBAR - Indonesia mengutuk serangan Israel yang menewaskan Direktur Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza Palestina, Marwan Al Sultan, beserta keluarga pada Rabu (2/7).

Kecaman ini diutarakan melalui pernyataan terbuka Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI) pada Kamis.

"Indonesia turut berduka atas wafatnya

■ Bersambung ke Hal 11



- Kelamaan ngendus, masuk angin
- He..he..he..